

STRATEGI KEPARIWISATAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

ROBBY DESMAN INDRA SAPUTRA

DR. TUTI KHAIRANI HARAHAP M. Si

**Administrasi Negara FISIP Universitas Riau. Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru
Panam,
Pekanbaru 28293**

Email : Robby_desman@rocketmail.com

Abtrack : The strategy of tourism at culture and tourism service of pekanbaru. The objective of this research was to find out the implementation of tourism's strategy at culture and tourism service of pekanbaru. This research is a qualitative research and the writer using snowball technique to collect the data. Based on the result of the research, the writer had concluded that the implementation of tourism's strategy by the culture and tourism service of pekanbaru was not running well, its evidenced by the lack of infrastructures as a tourism promotion, lack of budget as construction and tourism's development, and the employee's quality who has not executed the strategy that has been formulated in a maximum portion.

Keywords : *strategy, implementation, tourism*

Abstrak : Strategi Kepariwisataaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekan baru. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pengambilan data dilakukan dengan teknik snowball. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan strategi yang di lakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, hal ini di buktikan dengan masih kurangnya sarana dan prasarana promosi pariwisata, minimnya anggaran pembangunan dan pengembangan pariwisata, kemampuan pegawai yang belum melaksanakan strategi yang telah di rumuskan dengan maksimal.

Kata Kunci : Strategi , Pelaksanaan, Kepariwisataan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang mendapat perhatian pemerintah untuk terus dikembangkan sampai saat ini, karena sektor ini dinilai cukup berpotensi bagi perkembangan perekonomian rakyat dan penghasilan devisa negara dari komoditi nonmigas. Potensi ini didasarkan atas beberapa faktor pendukung seperti geografis dan keindahan alam serta kekhasan sosial budaya masyarakat Indonesia sebagai unsur tarik utama dalam pengembangan sector wisata. Oleh karenanya pengembangan industri pariwisata suatu pendapat daerah melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah. Secara ekonomi sektor ini memiliki jaringan ke depan (*forward linkage*) yang luas apabila dikembangkan, karena akan dapat menumbuhkan industri pariwisata dan industri jasa serta dampaknya bagi pembangunan ekonomi masyarakat yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja dan berorientai global. Selain itu juga membantu pembangunan daerah-daerah terpencil dalam suatu daerah jika mempunyai daya tarik wisata.

Sesuai undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah Kota Pekanbaru menggali semua potensi yang dimiliki dan mengharuskan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan potensi daerah. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah yaitu dengan melihat potensi-potensi yang dimilikinya mampu mengelolanya dengan baik serta memperjuangkannya. Dalam krisis ekonomi global, salah satu sector industri yang tidak merasakan dampaknya adalah kepariwisataan. Oleh karena itu, dikalangan penentu kebijakan perlu diingatkan bahwa dengan dilakukannya pembangunan sector kepariwisataan secara tidak langsung kemiskinan (*poverty allevication*). Pariwisata yang dikelola dengan baik juga dapat menambah salah satu pemasukan daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengembangan suatu objek wisata yang direncanakan dengan baik tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup masyarakat setempat tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang baik. Namun demikian, perlu disadari bahwa upaya-upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat membutuhkan dukungan penuh dan partisipasi dari masyarakat yang ada pada akhirnya diharapkan dapat terwujud iklim pariwisata yang kondusif bagi tumbuh dan kembangnya pariwisata Indonesia yang berdaya saing.

Sesuai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah maka peran pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata nasional akan membagi tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu tugas penting yang akan diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah adalah perencanaan dalam pengembangan pariwisata khususnya untuk masing-masing daerah di Indonesia. Pelimpahan tugas ini akan menuntut peran aktif dan proaktif daerah untuk mengembangkan berbagai peluang pariwisata di daerahnya dan secara professional merancang strategi-strategi pengembangan pariwisata daerahnya masing-masing, pariwisata yang maju, berkembang dan berkelanjutan.

Dengan adanya pembagian wewenang dalam bidang pariwisata maka dibutuhkan perencanaan yang baik dan kebijakan Pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki tersebut untuk mampu memunculkan formulasi objek wisata yang dapat berkompetisi dan bersinergi dengan wilayah di sekitarnya yang sudah maju. Sehingga, apabila suatu objek wisata dikembangkan atau ditangani dengan baik dan dengan perencanaan yang matang, maka akan berpengaruh kepada peningkatan lingkungan yang lebih baik.

Pengembangan sektor pariwisata memiliki prospek cukup strategis sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, apabila di kembangkan secara optimal. Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industry pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan objek dan potensi wisatanya, termasuk pembiayaan promosinya.

Dengan demikian pelaksanaan pembanguna nasional merupakan perimbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan bimbingan dan material dalam pelaksanaan pembangunan, sedangkan masyarakat berkewajiban untuk menunjang dan berperan serta secara aktif dalam graak langkah pembangunan dan kualitas administrasi pemrintah.

Secara umum pariwisata sangat potensial dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan devisa negara. Indonesia dengan keanekaragaman flora dan fauna, hutan alam dan bahari berpotensi sebagai daerah tujuan wisata baik nasional maupun sebagai jaringan pasar wisata internasional. Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam untuk dikembangkan menjadi sebagai daerah tujuan wisata, sebagian besar sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik. Maka dari itu masing-masing daerah di Indonesia yang memiliki potensi di bidang kepariwisataan semakin berbenah diri untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisatanya, begitu juga dengan Kota Pekanbaru.

Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Promosi Pariwisata Daerah Kota Pekanbaru bahwa pengembangan pariwisata adalah salah satu urusan yang diserahkan pemerintah Provinsi Riau kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan promosi pariwisatanya dimana tugas, wewenang dan fungsi ini diamanatkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru diharapkan berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan usaha-usaha pengembangan pariwisata. Kota Pekanbaru yang memiliki potensi pariwisata yang banyak berusaha untuk mengembangkan pariwisata daerahnya. Lembaga yang diberi wewenang dalam pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru ini yaitu Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Pekanbaru. Dalam upaya pengembangan pariwisata diperlukan suatu strategi yang tepat yang didasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta visi dan misi yang diembannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan bahwa tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan sebagian umum Pemerintah Daerah Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata. Tugas dan fungsi dinas tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 17 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang pariwisata, seni dan budaya, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokoknya : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- b. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- c. Pembinaan dan pelaporan
- d. Penyelenggaran urusan penatausahaan dinas
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang merupakan pusat pemerintahan sangat menguntungkan karena terletak di kawasan strategis yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura sehingga menjadi daerah pilihan untuk berbelanja. Pariwisata selalu identik dengan kegiatan yang menyenangkan, menghibur dan menarik untuk dikunjungi, karena itu pariwisata membutuhkan tempat-tempat yang nyaman, aman dan mempunyai daya tarik tersendiri ataupun kenangan bagi siapapun yang berkunjung pada suatu tempat oleh para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Untuk itu Pekanbaru yang dikenal sebagai Kota Bertuah memiliki banyak potensi wisata yang dikategorikan menjadi:

- a. Wisata budaya
- b. Wisata Pendidikan
- c. Wisata Sejarah
- d. Wisata alam dan rekreasi
- e. Wisata Belanja dan kuliner
- f. Wisata lainnya seperti olahraga, kerajinan dan pelabuhan

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Riau karena letak yang strategis di dekat pelabuhan, bandara internasional yang merupakan tempat transit dari Malaysia dan Singapura. Kota Pekanbaru merupakan kota yang memiliki daya tarik wisata belanja dan wisata kebudayaan melayunya yang cukup terkenal bagi wisatawan dari dan dalam luar kota serta wisatawan mancanegara sebagai salah satu produk wisata. Namun disamping memiliki daya wisata belanja dan wisata kebudayaan melayu yang cukup baik yang perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sebagai objek wisata di Kota Pekanbaru, belum mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

Eksplorasi dari berbagai potensi pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru masih belum maksimal terutama wisata alam seperti danau dan taman bermain, sejarah dan pendidikan serta kerajinan rakyat. Dari hasil penelitian penulis didapatkan informasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru secara umum permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau objek wisata masih mengalami kesulitan, masih menggunakan kendaraan pribadi.
2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan objek wisata
3. Masih langkanya cinderamata khas di tiap-tiap objek wisata
4. Objek wisata belum dikembangkan dan masih alami
5. Promosi tentang keunikan objek sangat terbatas
6. Sarana dan prasarana penunjang atraksi wisata masih terbatas
7. Masih kurangnya pembuatan buku tahunan tentang pariwisata di Kota Pekanbaru masih belum dilaksanakan tiap tahunannya karena anggaran tidak tiap tahunnya.

Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 urusan pemerintah pusat yang di limpahkan ke provinsi menjadi dua urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan

A. Urusan Wajib

Adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan standar di antara nya:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. Perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan di bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Urusan Pilihan

Adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di antara urusan pilihan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Perdagangan dan pertanian
- 3) Kehutanan
- 4) Energi dan sumber daya mineralpariwisata;
- 5) Pariwisata
- 6) Ketransmigrasian

Dari urusan pilihan yang di limpahkan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota urusan pariwisata adalah urusan nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi daerah Kota Pekanbaru yang menjadi tanggungjawab pemerintah kota pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Menurut **Suwantoro (2004:56)** sapta kebijaksanaan pengembangan pariwisata adalah:

- a. Promosi merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus dilaksanakan secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Aksebilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena menyangkut pengembangan lintas sector.
- c. Kawasan pariwisata
Pengembangan kawasan pariwisata dimaksud untuk:
 1. Meningkatkan peran serta daerah dan swasta dalam pengembangan pariwisata
 2. Memperbesar dampak pembangunan
 3. Mempermudah pengendalian terhadap lingkungan
- d. Wisata bahari
- e. Produk wisata merupakan upaya untuk menampilkan produk yang lebih bervariasi dan mempunyai kualitas daya saing tinggi.

- f. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dalam mengembangkan pariwisata yang harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk member jasa pelayanan pariwisata.
- g. Kemampuan nasional sadar wisata

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir atau sasaran tetapi, strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi adalah rencana yang disatukan, strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, strategi meliputi semua aspek penting dalam perusahaan. Strategi itu terpadu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa strategi sangat bermanfaat. Dengan menggunakan manajemen strategic, manajer pada semua tingkat dari suatu perusahaan dapat berinteraksi dalam menyusun perencanaan strategic dan mengimplementasikan strategis. Perencanaan strategis sebagai upaya yang mendisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang di kerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik, perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternative dan menekankan implementasi masa depan keputusan sekarang.

Menurut **Salusu (2004:85)** istilah strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” atau strategis dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal tetapi dalam bahasa Yunani juno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Menurut **David** terjemahan **Alexander Sindoro (2004:12)** strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran jangka panjang. Selanjutnya **David (2004:186)** mengatakan satu-satunya hal yang pasti dari masa depan organisasi apapun adalah perubahan dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang memperbesar kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut **Bratakusumah (2004:24)** bahwa dalam strategis suatu organisasi adalah konseptualisasi yang diekspresikan oleh pimpinan organisasi tentang:

1. Sasaran jangka panjang dari organisasinya
2. Kebijakan dan kendala baik yang di cetuskan sendiri oleh pimpinan itu maupun yang diperintahkan oleh atasannya yang justru merintang kegiatan organisasi
3. Seperangkat rencana yang sedang berjalan mengenai tujuan jangka pendek yang dipandang layak memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan/sasaran organisasi.

Menurut **Rangkuti (2006:7)** pada prinsipnya strategi dapat di kelompokkan menjadi tiga tipe yaitu:

1. Strategi Manajemen
Strategi meliputi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara mikro misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar dan strategi keuangan.
2. Strategi Investasi
Strategi yang merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau perusahaan melakukan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu visi baru atau strategi divestasi.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini sering di sebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi dan strategi organisasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodr kualitatif dengan pengumpulan data primer maupun sekunder melalui wawancara dengan informan penelitian untuk mendapat informasi tentang topik penelitian dan observasi ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi kepariwisataan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dilapangan, apakah sesuai dengan yang telah direncanakan kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi dan fakta dilapangan.

HASIL

Pelaksanaan strategi di lapangan oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap suatu organisasi sangat berpengaruh dengan bagaimana perencanaan strategi dan sejauh pelaksanaan strategi itu dilakukan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi yang telah di tetapkan sehingga memberikan hasil yang optimal terhadap perkembangan organisasi dan pelaksanaan strategi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan strategi kepariwisatan ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru yaitu :

1. Strategi Manajemen

Strategi meliputi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara mikro misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar dan strategi keuangan.

2. Strategi Investasi

Strategi yang merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau perusahaan melakukan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu visi baru atau strategi divestasi.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis ini sering di sebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi dan strategi organisasi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan strategi kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu :

1. Strategi Manajemen

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata dilakukan dengan cara :

- a) merumuskan perencanaan tentang promosi pariwisata yang akan di jalankan
- b) Pelaksanaan teknis promosi pariwisata di lapangan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- c. Pelayanan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- d. Pembinaan dan pelaporan dinas kebudayaan dan pariwisata dilakukan dengan cara :
 - a) Pembinaan pameran pariwisata
 - b) Membuat laporan pelaksanaan pameran
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas kebudayaan dan pariwisata dilakukan dengan:
 - a) menyiapkan kelengkapan administrasi berupa surat masuk dan surat keluar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - b) Menginventarisasikan permasalahan
 - c) Pemecahan atau solusi permasalahan

Pada indikator strategi manajemen ini pelaksanaan program kerja yang telah di tentukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata guna mewujudkan tujuan organisasi masih belum maksimal karena kenyataan di lapangan dapat di temukan bahwa promosi yang dilakukan terhadap objek pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru masih kurang, masih belum terksana dengan baik sehingga objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru belum begitu di kenal oleh wisatawan local dan wisatawan asing hanya objek wisata belanja yang baru menjadi primadona dan andalan padahal masih ada beberapa wisata yang harus gencar di promosikan keberadaannya sehingga dapat menjadi tujuan wisata andalan.

2. Strategi Investasi

- a. Perencanaan Pembangunan melalui Master Plan dan Detail Enggining Detail
- b. Meningkatkan kepercayaan investor baik dari dalam dan luar negeri dalam menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Pada indikator strategi investasi Prioritas yang di rencanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru jmelalui Master Plan dan DED (Detail Enggining Detail) seharusnya dapat menarik minat inverstor baik pemerintah maupun swasta untuk ambil bagian dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru, namun pada kenyataannya semua proyek pembangunan baik sarana prasarana serta infrastruktur yang di canangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru masih dibiaya pemerintah Kota Pekanbaru melalui Anggaran Pembangunan Belanja Daerah sehingga pembangunan dan pengembangan objek wisata belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga masih banyak objek wisata yang belum dikelola dengan baik.

3. Strategi Bisnis

- a. Program pengembangan nilai budaya dilakukan dengan cara :
 - a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
 - b) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya dilakukan dengan cara:
 - a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - b) Pagelaran kesenian dan budaya daerah

- c. Program pengembangan pemasaran pariwisata dilakukan dengan cara :
 - a) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
 - b) Pelaksanaan promosi pariwisata kota pekanbaru baik di dalam dan luar negeri
 - c) Penyuluhan sadar wisata dan promosi melalui brooklet
- d. Program pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan cara :
 - a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - b) Pengembangan objek pariwisata unggulan
- e. Program Pengembangan Kemitraan di lakukan dengan cara :
 - a) Pengembangan dan penguatan informasi dan database mitra pariwisata
 - b) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
 - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan.
 - d) Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.
 - e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraaan pariwisata.

Pada indicator strategi bisnis banyak langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam menerapkan strategi bisnis yang telah direncanakan, dari 5 (lima) program yang telah diterapkan dalam strategi bisnis masih terdapat beberapa strategi kendala yang berarti dan belum dapat diselesaikan diantaranya :

1. Program Pemasaran Pariwisata

meski telah di sediakan booklet,famplet namun hanya diletakkan ketika ada pameran pariwisata bukannya di tawarkan kepada pengunjung sehingga terkesan tanpa penjelasan yang dapat menarik minat pengunjung yang akan berwisata, kemudian buku tahunan yang buku tahunan yang berisikan informasi kekayaan objek wisata, budaya, kekhasan Kota Pekanbaru dengan segala daya tarik yang dimiliki serta fasilitas,sarana,prasarana serta infrastruktur yang disediakan tidak rutin di cetak setiap tahunnya, dimana terakhir kalinya di buat buku tahunan ini 2010, padahal buku tahunan ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui informasi terbaru yang ada di Kota Pekanbaru, ini dikarenakan anggaran tidak mencukupi sehingga hanya dibuat ketika anggaran bukan setiap tahunnya.

2. Program Pengembangan Destinasi Wisata

Masih banyaknya objek wisata di Kota Pekanbaru yang masih belum dikelola di Kota Pekanbaru ini menjadikan objek yang diketahui oleh masyarakat,wisatawan hanya itu-itu saja padahal banyak objek wisata seperti agro wisata dan wisata perkebunan yang juga mempunyai daya tarik wisata bagi penyukai agro wisata, wisata yang dikembangkan di Kota Pekanbaru baru sebatas wisata Danau Bandar Khayangan dan Taman Rekreasi Alam Mayang, apabila objek wisata lainnya juga di kembangkan akan menambah pilihan objek wisata dan destinasi wisata yang akan di kunjungi oleh wisatawan baik oleh masyarakat Kota Pekanbaru maupun wisatawan dari dalam dan luar negeri sehingga berdampak pada pembangunan dan pengembangan serta perekonomian yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Program Pengembangan Kemitraan

Dalam pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan kerja sama baik itu dengan pihak pemerintah maupun pihak swasta seperti hotel, biro perjalanan, pusat jajanan dan oleh-oleh dan restaurant, karena ketika seseorang memutuskan untuk pergi berwisata dan tinggal di suatu daerah membutuhkan akomodasi dan fasilitas yang

memadai dan berkualitas sehingga betah untuk berwisata. Dengan adanya program kemitraan dengan pihak-pihak ini dapat meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru, namun program kemitraan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru baru sebatas menggandeng para mitra dalam pameran wisata yang dilakukan seperti event pameran keluar negeri tanpa ada pelatihan, pembinaan yang sesuai dengan langkah promosi yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata sebagai pihak yang mengelola destinasi wisata yang ada di Kota Pekanbaru sehingga promosi masih kurang maksimal dikarenakan belum adanya pelatihan dan pembinaan pada mitra pariwisata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang strategi Kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhi maka pada bab ini penuliskemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan instansi terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik hal ini dapat terlihat dari berbagai kendala-kendala yang sangat signifikan di lapangan sehingga mempengaruhi keberhasilan strategi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru harus lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, masyarakat dalam mengelola, mengembangkan objek-objek pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru sehingga dapat lebih menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah faktor kekuatan berupa adanya dukungan dari pemerintah, faktor kelemahan adanya keuangan daerah yang terbatas, faktor masih minimnya objek wisata alam yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga cukup sulit mengembangkan objek wisata alam yang menjadi primadona seperti wisata belanja dan olahraga yang telah cukup menjanjikan perkembangannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian Strategi Kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan perhatian khusus bagi pengembangan pariwisata dengan memberikan anggaran yang dibutuhkan, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan pariwisata agar lebih maju sehingga dengan anggaran yang cukup dapat dibangun lagi objek wisata buatan yang bisa menjadi objek wisata unggulan di Kota Pekanbaru.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai Dinas yang bertanggungjawab dalam urusan pariwisata di Kota Pekanbaru harus lebih

meningkatkan kinerja sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak hanya habis untuk pengeluaran rutin namun juga pengembangan serta pembinaan pariwisata maupun mitra pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan dalam menjalankan strategi kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru lebih memperhatikan dan memaksimalkan matriks SWOT strategi kepariwisataan yang ada sehingga kekuatan dan peluang namun berjalan maksimal dan beriringan sehingga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman yang ada di lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

Rangkuti, Freddy. 2006, *Analisis SWOT Teknik Pembedah Kasus Bisnis*

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Suwantoro, Gamal, 2004, *Dasar-dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta

Salusu, J. 2004, *Pengambilan Keputusan Strategis untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: PT. Grasindo Widiasarana Indonesia

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah